

## Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Aisyah Alda<sup>1</sup>, Wiene Surya Putra<sup>2</sup>, Aminah Puspitasari<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul H. Hasan Al- Ishlahiyah, Binjai, Indonesia

Email: aisyahalda016@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol:1,Nomor:2,Desember 2023 Halaman : 679-687	<i>The aim of this research is to find out about educational policy evaluation. The research method used was a literature review study. The author collected various copies of education policy evaluation documents. In this literature review research used are books and national journals which have been summarized and analyzed. Based on research results, educational policy evaluation is an activity to find out whether an educational policy is truly appropriate according to predetermined criteria and has a real impact on society in accordance with what is desired. The process must be carried out in implementing education policy analysis, so that it can be seen whether the education policy can be implemented well or not, whether changes or improvements are needed. At the same time, you can find out the advantages and disadvantages of the applied educational policy. Education policy evaluation is not the final stage of a policy process, it can be carried out in the middle of the analysis process, with the consideration that the policy program leads to failure or does not meet the desired desires.</i>
<b>Keywords:</b> Implementation Evaluation Education Policy	

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur review. Penulis mengumpulkan berbagai salinan dokumen evaluasi kebijakan pendidikan. Pada penelitian kajian pustaka ini yang digunakan adalah buku, dan jurnal nasional yang telah diringkas dan dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan serta memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Prosesnya harus dilakukan dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan, agar dapat diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut bisa terlaksana dengan baik atau tidak, apa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pendidikan tersebut diaplikasikan. Evaluasi kebijakan pendidikan bukan merupakan tahapan akhir dari sebuah proses kebijakan, dapat dilakukan ditengah proses analisis, dengan adanya pertimbangan program kebijakan itu mengarah kepada kegagalan atau kurang sesuai dengan keinginan yang diinginkan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Evaluasi, Kebijakan Pendidikan

### PENDAHULUAN

Pendidikan dalam pembangunan nasional adalah salah satu prioritas yang sangat penting. Perkembangan suatu negara sangat bergantung dari kualitas pendidikan dan sumberdaya masyarakat negara tersebut. Apabila kualitas pendidikan di Indonesia meningkat, maka bangsa ini akan semakin maju. Demikian juga sebaliknya, apabila kualitas pendidikan rendah maka bangsa tersebut akan mengalami kemunduran.

Indonesia masih terus berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kebijakan diterapkan sebagai upaya untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan pendidikan muncul dari input, proses sampai output. Tiga bagian permasalahan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Tahapan input memiliki permasalahan dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran yang terganggu dapat berdampak pada hasil luaran dan akan berputar kembali menjadi permasalahan input (sumber daya manusia) ketika masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Permasalahan dapat terlihat juga ketika ada didunia kerja.

Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan selayaknya fokus pada peningkatan kualitas peserta didik. Sekolah tidak boleh lengah dan lebih berfokus pada kepentingan institusi yang belum tentu terkait dengan kebutuhan peserta didik. Kesalahan pandangan dalam menentukan fokus juga tidak hanya ditemui disekolah, tetapi di lingkungan keluarga. Orang tua sebagai daya dukung peserta didik masih

ditemui salah dalam menempatkan tujuan. Orang tua menyekolahkan anaknya dengan tujuan untuk meningkatkan derajat seiring dengan gelar yang diperoleh yang seharusnya juga berupaya untuk dapat tertanamnya nilai-nilai baik pada anak. Namun, tidak memberikan contoh teladan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik ketika beraktivitas (Megawanti, 2012).

Upaya “meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat” (Sholeh, 2005). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja. Persoalan penting yang perlu disorot dalam permasalahan ini adalah apakah kebijakan pendidikan itu dapat diaplikasikan dengan baik dan juga dapat menghasilkan output yang diinginkan, bahwa hasil akhir dari semua kebijakan ini sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam tujuan dari pendidikan tersebut.

Sistem Pendidikan Nasional adalah sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Seiring tuntutan pembaharuan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat dan menghafal (rote learning), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni “learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be.” Sistem Pendidikan Nasional adalah “sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional” (Daulay, 2004).

Salah satu upaya untuk dapat mengetahui seberapa sesuai dan seberapa besar hasil yang diupayakan pemerintah maka sangat perlu adanya kegiatan evaluasi dari kebijakan pendidikan dari pemerintah tersebut. Untuk dapat lebih memahami tentang evaluasi kebijakan pendidikan itu, maka di jurnal ini akan dikupas tentang evaluasi pendidikan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta data-data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian (review of research) (Mulyadi, 2012). Pada penelitian kajian pustaka ini yang digunakan adalah buku, Peraturan Pemerintah, dan jurnal nasional yang telah diringkas dan dianalisa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan serta memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Prosesnya harus dilakukan dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan, agar dapat diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut bisa terlaksana dengan baik atau tidak, apa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pendidikan tersebut diaplikasikan. Tak kalah penting juga, kita bisa dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan tersebut, dapat memberikan manfaat atau menimbulkan kerugian, kegaduhan dan lain sebagainya. Dalam tahapan manajemen, kegiatan evaluasi merupakan tahapan akhir dari proses pembuatan kebijakan yang menghasilkan masukan untuk dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan itu.

Analisis kebijakan pendidikan yang ideal tentu memiliki ruang penilaian (evaluasi), mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Jika dipandang perlu, ada perubahan terhadap kebijakan pendidikan, maka mesti dilakukan. Mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan, merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan guna mengukur nilai atau manfaat dari hasil kebijakan pendidikan tersebut.

Sekaligus untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan pendidikan telah terlaksana atau belum terlaksana dan berhasil atau gagal sesuai dengan yang diharapkan atau tidak (Supandi, 1988).

Kebijakan pendidikan menjadi bagian dari kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan untuk menilai keefektifan dan bentuk pertanggung jawaban penyelenggara pendidikan kepada publik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan guna mengukur tingkat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk itu evaluasi kebijakan pendidikan bisa menjadi alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan pendidikan, guna menentukan rekomendasi bagi perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan pendidikan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan (Hasbullah;2015).

Pada umumnya evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses atau kegiatan dilakukan secara berurutan, dan menjadi tahapan akhir dalam proses analisis kebijakan. (Islamy,1994; Winarno,2008). Namun demikian, ada beberapa ahli mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan bukan merupakan tahapan akhir dari sebuah proses kebijakan, dapat dilakukan ditengah proses analisis, dengan adanya pertimbangan program kebijakan itu mengarah kepada kegagalan atau kurang sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Sebab, seringkali terjadinya, kebijakan gagal meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan adanya pengajuan berbagai alasan yang rasional sebagai berikut :

- 1) apakah hal-hal yang sudah dirumuskan dalam formulasi kebijaksanaan pendidikan tersebut dapat dilakukan atau tidak,
- 2) apakah rumusan kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan sudah berhasil atau belum,
- 3) apakah kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan pendidikan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan,
- 4) seberapa jauh rumusan kebijakan pendidikan itu telah dapat diimplementasikan,
- 5) apakah keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut,
- 6) seberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan pendidikan terhadap masyarakat,
- 7) apakah resiko-resiko yang telah diperhitungkan saat formulasi kebijakan pendidikan sudah dapat diatasi dengan baik atau tidak,
- 8) bagaimana langkah-langkah yang dapat digunakan dalam hal perbaikan kebijakan pendidikan selanjutnya.

Untuk mendapatkan jawaban yang rasional dari alasan-alasan tersebut, pada permasalahan yang menarik analisis untuk melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, maka diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif antar aktor yang melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain

- 1) aktor formal, terdiri dari pembuat kebijakan (legislatif), pelaksana kebijakan (eksekutif), administrator dari tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal sebagai pelaksana pendidikan.
- 2) Aktor non formal, diantaranya pengurus dan anggota partai politik, organisasi masa, interest group, kelompok perantara.

Kaufman dan Thomas telah mengemukakan ada delapan Model monitoring dan Evaluasi Program seperti berikut ini (Moerdiyanto, 2006).

- a. Goal-oriented Evaluation Model (Model Evaluasi berorientasi Tujuan), Adalah model evaluasi yang paling awal, dikembangkan awal tahun 1961, memfokuskan kepada pencapaian tujuan pendidikan "sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Indikator pencapaian tujuan ditunjukkan oleh prestasi belajar peserta didik, kinerja guru, efektivitas PBM, kualitas layanan prima.
- b. Goal-free Evaluation Model (Model Evaluasi Bebas Tujuan), Adalah evaluasi yang tidak didasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Evaluasi ini berorientasi pada pihak eksternal, pihak konsumen, stake holder, dewan pendidikan, masyarakat. Evaluasi tersebut, terfokus atas adanya perubahan perilaku yang terjadi yang merupakan dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan yang baik yang diharapkan

ataupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan program sebelumnya. Evaluasi juga membandingkan antar hasil yang dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam program tersebut (cost benefit analysis).

c. **Formatif-summatif Evaluation Model**, Evaluasi model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, dengan membedakan evaluasi menjadi dua jenis, yaitu:

1) **Evaluasi formatif**, Bersifat internal berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program atau personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan (in-progress). Monitoring dan supervisi, termasuk dalam kategori evaluasi formatif, dilakukan selama kegiatan program sedang berlangsung, dan akan menjawab berbagai pertanyaan:

- a) Apakah program berjalan sesuai rencana?
- b) Apakah semua komponen berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing?
- c) Jika tidak apakah perlu revisi, modifikasi?

2) **Evaluasi summatif**, dilakukan pada akhir program tersebut, bertujuan untuk dapat mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggung jawaban atas tugasnya, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau memberhentikan program pada tahun berikutnya. Evaluasi akan dapat menjawab pertanyaan:

- a) Sejauh mana tujuan program tersebut tercapai?
- b) Perubahan apa yang terjadi setelah program selesai?
- c) Apakah program telah bisa menyelesaikan masalah?
- d) Perubahan perilaku apa yang dapat ditampilkan dan dirasakan setelah selesai mengikuti pelatihan?

3. **Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi)**, Evaluasi ini berfokus pada program pendidikan, untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Model ini ada 3 tahapan program, yaitu:

- 1) **Antecedent phase**, tahap sebelum program dilaksanakan. Evaluasi akan melihat kondisi diawal program, faktor-faktor yang direncanakan akan mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan, kesiapan siswa, guru, staf administrasi, dan fasilitas sebelum program dilakukan
- 2) **Transaction phase**, saat program dilaksanakan. Evaluasi difokuskan agar dapat melihat program berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, bagaimana partisipasi masyarakat, keterbukaan, kemandirian kepala sekolah,
- 3) **Outcomes phase**, akhir program untuk mengetahui perubahan yang terjadi akibat program yang telah dilakukan.
  - a) Apakah para pelaksana menunjukkan perilaku yang baik, kinerja tinggi?
  - b) Apakah klien (konsumen) merasa puas dengan program yang dilaksanakan?
  - c) Perubahan perilaku apa yang dapat diamati setelah program tersebut selesai?

e. **Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsif)**, Evaluasi ini dikembangkan sejalan dengan adanya perkembangan manajemen personal, perubahan perilaku (behavior change). Evaluasi model ini dilakukan untuk program-program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang perlu ditangani dengan aspek humaniora. Evaluasi focus pada reaksi berbagai pihak atas program yang diaplikasikan, serta mengamati dampak akibat dari hasil pelaksanaan program tersebut.

f. **CIPP Evaluation Model (Model Evaluasi CIPP)**, CIPP singkatan dari Context, Input, Process, Product, merupakan model evaluasi yang berorientasi terhadap pengambilan keputusan. Menurut Stufflebeam, "Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing usefull information for judging alternative decision making". Stufflebeam menggolongkan evaluasi menjadi empat jenis dilihat dari alternatif keputusan yang diambil dan tahapan program yang dievaluasi. Dari empat tahapan tersebut, setiap tahapan evaluasi adanya informasi pembuatan keputusan:

- 1) **Evaluasi Context**, Dilakukan atas tahap peninjauan menghasilkan informasi untuk keputusan perencanaan (planning decision). Evaluasi konteks melihat bagaimana kondisi kontekstual, apa harapan masyarakat, apa visi dan misi lembaga yang akan dievaluasi.
- 2) **Evaluasi Input**, Dilakukan pada tahap awal untuk menghasilkan informasi sebagai keputusan penentuan strategi pelaksanaan program (structuring decision). Evaluasi input akan

melihat bagaimana kondisi dari input (masukan) baik raw input ataupun instrumental input. Raw input adalah input yang diproses menjadi output, untuk lembaga pendidikan adalah peserta didik. Instrumental input seperti guru, fasilitas, kurikulum, manajemen, adalah input pendukung dalam penerapan program.

- 3) Evaluasi Process, Dilakukan sewaktu program berjalan untuk menghasilkan informasi tentang pelaksanaan program. Evaluasi proses ini dapat melihat bagaimana kegiatan program berjalan, partisipasi peserta, narasumber atau guru, penampilan guru atau instruktur pada PBM di kelas, bagaimana penggunaan dana, bagaimana interaksi guru dan peserta didik di kelas. Berapa persen keberhasilan yang telah dicapai, dan memperkirakan keberhasilan di akhir program. Jenis keputusan ini adalah pelaksanaan (implementing decision).
- 4) Evaluasi product, Dilakukan saat akhir program, untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Sejauh mana tujuan telah dicapai, hambatan yang ditemui dan solusinya, bagaimana tingkat keberhasilan program meliputi: efektivitas, efisiensi, relevansi, produktivitas, dan sebagainya. Evaluasi produk menghasilkan informasi sebagai keputusan kelanjutan program (recycling decision). Evaluasi produk juga sebagai akuntabilitas pimpinan tentang program yang akan menjadi tanggung jawabnya kepada stake holder.

g. CSE-UCLA Evaluation Model (Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles). Evaluasi model CSE-UCLA hampir sama modelnya dengan model CIPP, termasuk kategori evaluasi yang komprehensif. Evaluasi CSE-UCLA melibatkan 5 tahapan evaluasi, yaitu:

1) Tahap pertama

- a) Evaluasi dimulai dengan Needs Assessment, dimana evaluasi mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan antara status suatu program atau kondisi kenyataan (what is) dengan yang diharapkan (what should be). Apa problem yang dihadapi? Masalah apa yang ada dalam lembaga?

2) Tahap kedua

Perencanaan dan pengembangan (program planning and development), melihat apakah program tersebut sesuai untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan? Keputusan yang diambil adalah pemilihan strategi untuk mencapai tujuan suatu program.

3) Tahap ketiga

Pelaksanaan, evaluasi berfokus kepada implementasi program. Evaluasi akan menjawab pertanyaan:

- a) Apakah program berjalan sesuai dengan yang direncana?
- b) Bagaimana penampilan para guru, siswa?
- c) Bagaimana kesan dan sikap orang tua dan masyarakat akan adanya program tersebut?
- d) Bagaimana proses belajar mengajar disekolah tersebut?
- e) Jenis rekomendasi antara lain: Apa yang perlu dirubah, diperbaiki, dibenahi
- f) agar pada tahap akhir program mencapai keberhasilan?

4) Tahap keempat

Evaluasi dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai. Sejauhmana program dapat mencapai tujuan yang direncanakan? Apa hasil yang dicapai sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan?

5) Tahap kelima

Evaluasi berfokus pada penilaian terhadap kemanfaatan program. Pertanyaan berkisar bagaimana keberadaan program? Bagaimana manfaat program terhadap personal dan lembaga? Jenis rekomendasi tahap ini adalah program perlu dikembangkan, diperpanjang, dimodifikasi, dikurangi ataupun bahkan dihentikan.

h. Discrepancy Evaluation Model (DEM) oleh Provus, Dikembangkan oleh Malcom Provus, focus pada perbandingan hasil evaluasi dengan performa standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang suatu program yang telah dilaksanakan: akan ditingkatkan, akan dilanjutkan, atau mungkin dihentikan. Evaluasi program dengan model DEM melibatkan 4 tahapan sesuai dengan tahapan kegiatan organisasi atau program yang akan dievaluasi:

- 1) Mengidentifikasi program (program definition), Evaluasi fokus pada penentuan dan rumusan tujuan
- 2) Penyusunan program (program installation), Evaluasi fokus pada isi atau substansi program, cara-cara, metode, mekanisme untuk mencapai suatu tujuan
- 3) Pelaksanaan kegiatan program (program implementation), Evaluasi fokus untuk mengukur perbedaan yang terjadi antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan (standar).
- 4) Hasil yang dicapai program (program goal attainment), Kegiatan evaluasi menginterpretasikan hasil yang ditemui evaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai pembuatan keputusan. Keputusan dapat berupa perevisian program dan atau melanjutkan program kegiatan. Evaluasi mengukur Performance pada setiap tahapan program lalu membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Pertanyaan evaluasi dalam Model DEM:
  - 1) Apakah program sudah diidentifikasi dengan baik dan jelas?
  - 2) Apakah program telah disusun dengan baik?
  - 3) Apakah program dilaksanakan dengan baik, dan apakah tujuan pendukung
  - 4) (enabling objectives) dapat dicapai
  - 5) Apakah tujuan akhir program telah dapat dicapai.

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat juga dimaknai sebagai usaha untuk mengetahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan dengan mencermati beberapa aspek, antara lain; a) mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satunya adalah mengukur kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan; b) mengukur dampak suatu kebijakan yang dilakukan pada tahap lebih lanjut, evaluasi ini ditujukan untuk melihat dampak dari kebijakan, positif maupun negatif; c) mengetahui tingkat dan bentuk penyimpangan jika terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; d) bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang (Kawengian, and Rares, (2015).

Pemahaman lebih luas dan mendalam tentang tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain mengukur 1) apakah pengaruh program terhadap masyarakat, misalnya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan gratis, atau intervensi sosial (social intervention) untuk menyelesaikan masalah situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat, 2) apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 3) apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, misalnya program BOS mempunyai standar besarnya bantuan yang berbeda untuk setiap siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Apakah penggunaan bisa dipertanggung jawabkannya, sehingga benar-benar semua standar sudah dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut, 4) mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak jalan, 5) pengembangan staf pelaksana program pendidikan, apakah staf mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk untuk bekerja?, pelatihan apa yang segera dilakukan, apakah para staf perlu menerima supervisi dan koreksi atas kelemahannya, 6) memenuhi ketentuan Undang-undang dan produk peraturan lainnya (Subarsono, 2013: 120-121). Melengkapi uraian diatas, dapat ditambahkan beberapa tujuan evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang agar dihasilkan kebijakan pendidikan yang lebih baik (Wirawan, 2011:23).

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat juga dimaknai sebagai usaha untuk mengetahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan dengan mencermati beberapa aspek, antara lain; a) mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satunya adalah mengukur kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan; b) mengukur dampak suatu kebijakan yang dilakukan pada tahap lebih lanjut, evaluasi ini ditujukan untuk melihat dampak dari kebijakan, positif maupun negatif; c) mengetahui tingkat dan bentuk penyimpangan jika terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; d) bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang (Kawengian, and Rares, (2015).

Pemahaman lebih luas dan mendalam tentang tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain mengukur 1) apakah pengaruh program terhadap masyarakat, misalnya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan gratis, atau intervensi sosial (social intervention) untuk menyelesaikan masalah situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat, 2) apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 3) apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, misalnya program BOS

mempunyai standar besarnya bantuan yang berbeda untuk setiap siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Apakah penggunaan bisa dipertanggung jawabkannya, sehingga benar-benar semua standar sudah dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut, 4) mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak jalan, 5) pengembangan staf pelaksana program pendidikan, apakah staf mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk untuk bekerja?, pelatihan apa yang segera dilakukan, apakah para staf perlu menerima supervisi dan koreksi atas kelemahannya, 6) memenuhi ketentuan Undang-undang dan produk peraturan lainnya (Subarsono, 2013: 120-121). Melengkapi uraian diatas, dapat ditambahkan beberapa tujuan evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang agar dihasilkan kebijakan pendidikan yang lebih baik (Wirawan, 2011:23).

Banyak sekali problematika yang dialami dalam kegiatan mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut seperti sebagai berikut:

- a. Bila tujuan kebijakan tersebut tidak diketahui jelas. Ketidakjelasan tujuan itu diakibatkan karena adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan saat formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus yang demikian karena memang dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada. Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa menjadi penyebab formulasi kebijakan itu tidak disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui berarti tidak dapat diimplementasikan. Maka dari itu, tujuan dirumuskan umumnya kabur dan bisa bermakna ganda. Padahal gandanya makna justru dapat menyulitkan evaluasinya.
- b. Cepatnya perkembangan masyarakat menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini dapat menyulitkan evaluasi kebijakan, karena masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga bisa berubah dan berganti dengan masalah yang lain. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi kebijakan sudah tidak ada, sementara masalah baru bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah lama muncul akan muncul kepermukaan.
- c. Tidak jelas apa masalahnya, sumber masalah dan gejala masalahnya. Ketidakjelasan yang demikian bisa terjadi karena adanya masalah, sumber masalah, dan gejala masalah sudah merebak. Hal ini terjadi karena masalah-masalah tersebut merupakan golongan masalah sosial, antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang saling interchange.
- d. Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain. Sebagai contoh: tidak bisa membedakan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab masyarakat yang bodoh dan terbelakang cenderung miskin, dan begitu sebaliknya .
- e. Subjektifnya masalah kebijakan. Dapat diketahui dari ada perbedaan masalah menurut persepsi orang satu dengan orang lain. Bahkan sesuatu oleh seseorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, justru dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan.

## KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan serta memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Prosesnya harus dilakukan dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan, agar dapat diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut bisa terlaksana dengan baik atau tidak, apa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pendidikan tersebut diaplikasikan.

Untuk melakukan evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan adanya pengajuan berbagai alasan yang rasional seperti; apakah hal-hal yang sudah dirumuskan dalam formulasi kebijaksanaan pendidikan tersebut dapat dilakukan atau tidak, apakah rumusan kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan sudah berhasil atau belum, apakah kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan pendidikan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, seberapa jauh rumusan kebijakan pendidikan itu telah dapat diimplementasikan, apakah keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, seberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan pendidikan terhadap masyarakat, apakah resiko-resiko yang telah

diperhitungkan saat formulasi kebijakan pendidikan sudah dapat diatasi dengan baik atau tidak, dan bagaimana langkah-langkah yang dapat digunakan dalam hal perbaikan kebijakan pendidikan selanjutnya.

Evaluasi memiliki aktivitas yang dijalankan pada pelaksanaan sebuah kebijakan supaya dapat mengetahui apakah kebijakan itu terselenggara secara baik atau tidak, mengetahui kekurangan serta keunggulan kebijakan tersebut dan mengetahui seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan.

## REFERENCES

- Chaterine, R. N. (2022). Nadiem: Kurikulum Prototipe Akan Kembalikan Peran Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/13425621/nadiemkurikulum-prototipe-akan-kembalikan-peran-guru-sebagai-pemimpin>
- Hasbullah. (2015). Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan diIndonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76-84. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.388>
- Asep Suryana, M.Pd, *Jurnal, Strategi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah*,
- H. Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam SISDIKNAS di Indonesia, Cet 1, Kencana, Jakarta, 2004.*
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Petunjuk Teknis Monitoring Dan Evaluasi, 2013.*
- Moerdiyanto, *Teknik Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Dalam Rangka Memperoleh Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen , 2009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Jamilus, J., & Muntatsiroh, A. (2023). Pentingnya Evaluasi Pendidikan Islam dalam Sebuah Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1-13. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11472>
- Munawar Sholeh, *Politik Pendidikan, IPE, Grafindo Khasanah Ilmu, Jakarta, 2005 Cet.1.*
- Munawar Sholeh, *Politik Pendidikan, IPE, Grafindo Khasanah Ilmu, Jakarta, 2005 Cet.1.*
- Nanang Fattah, (1996), *Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya*  
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Ratna Dewi, *Jurnal Ilmu Hukum, Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Jambi* Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016.
- Sigit Purnama, *Jurnal, Penilaian Kebijakan Pendidikan ( Education Polcy Research ), Universitas Negeri Malang, , 30 November 2010.*
- Sigit Purnama, *Makalah Diskusi Program Doktor , Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2010, Universitas Negeri Malang*

Aulia, S. (2013), Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1).

<http://edukasi.kompas.com>, BOS SMA Dikururkan, diakses tanggal 9 Oktober 2012.